

	News Title : Kantor Robot Trading DNA Pro Berkedok MLM Kembali Disegel	
	Media Name : Detik.com	Journalist : Aulia Damayanti
	Publish Date : 29 January 2022	Tonality : Neutral
	News Page : 1	News Value : 3,000,000
	Resources : Veri Anggrijono (Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)), Indrasari Wisnu Wardhana (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Berita Ekonomi Bisnis	Topic : robot trading forex ilegal

Kantor Robot Trading DNA Pro Berkedok MLM Kembali Disegel

Aulia Damayanti - detikFinance

Sabtu, 29 Jan 2022 15:00 WIB

21 komentar

SHARE



Foto: Dok. Kemendag

Jakarta - Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar (Mabes) Poli kembali menyegel kantor PT DNA Pro Akademik. Perusahaan itu adalah pelaku usaha yang melakukan penjualan *robot trading* dengan sistem MLM.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono mengungkap penyegelan kembali dilakukan karena PT DNA Pro Akademik membangkang dengan membuka segel. Padahal telah disegel pada Jumat (28/1) malam tadi.

"Setelah kami lakukan pengawasan berdasarkan informasi yang kami terima, segel penutupan PT DNA Pro Akademik terbukti dilapas. Untuk itu, Kemendag bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Poli menindak tegas PT DNA Pro Akademik dengan menyegel kembali kantor perusahaan tersebut. Implikasi pidananya kami serahkan kepada penegak hukum lainnya," tegasnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/1/2022).

Baca juga:

[Robot Trading yang Terbukti 23 Bulan Profit Konsisten](#)

PT DNA Pro Akademi diduga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu menjalankan kegiatan usaha penjualan *expert advisor/robot trading* dengan menggunakan sistem *multi level marketing* (MLM).

"Atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya) yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung dari Kemendag," lanjut Veri.

Veri menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori risiko tinggi.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-Sektor Perdagangan, pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dihukum pidana," ujar Veri.

Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan dan terbukti membangkang dengan membuka segel penutupan usaha dan beroperasi kembali.

"Tindakan tegas ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang melarang kegiatan PT DNA Pro Akademi pada Januari 2022," tambah Wisnu.

Kegiatan yang dilakukan PT DNA Pro Akademi diduga juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Baca juga:

[Robot Trading Berkedok MLM Terbongkar, Kemendag Turun Tangan](#)

Menurut Wisnu, Kemendag akan bersikap tegas terkait pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.

"Kami berharap pelaku usaha mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," ungkap Wisnu.

Demi melindungi masyarakat dari berbagai usaha ilegal dan merugikan, Wisnu meminta masyarakat selalu berhati-hati dan waspada apabila melakukan investasi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bappebti.go.id.

"Guna melindungi masyarakat dari berbagai bujukan dan rayuan para pelaku usaha investasi ilegal, Kemendag dan Mabes Poli berkomitmen akan terus bersinergi melakukan pengawasan. Kodua lembaga juga tidak segan-segan menegakkan supremasi hukum dengan memberikan sanksi administrasi hingga pidana," pungkas Wisnu.